

# HAKIKAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ISLAM

**M. Anzaikhan**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

*m.anzaikhan@yahoo.co.id*

## ABSTRACT

*As a teaching that originates from revelation, Islam does not only speak in the orientation of aqidah and worship alone. More than that, Islam also discusses all scientific dimensions including good and efficient administrative models. The process of Islamization can take the form of a classical concept that is being tried again, or an offer for the future as a media solution in responding to the current government administration. A nation as large as the era of the Prophet Muhammad would not have survived if there were no solid and ideal government administration system. Likewise, in the time of the Bani Ummayah, the Abbasids, even the Ottoman era which carved the history of Islam as the largest and most respected group of its time. Once again, this glory could not have been achieved if the Islamic government at that time did not have the knowledge of qualified government administration. Administration is divided into two. (1) Administration in the strict sense is an administrative activity which includes the activities of note-taking, correspondence, bookkeeping and filing of letters as well as other matters intended to provide information and facilitate obtaining information back if needed. (2) Administration in the broad sense is the translation of the narrow meaning that includes the external function of the correspondence itself. Whether it is the background of the letter, the purpose of the letter, the benefits of the letter, the deadline of the letter, and so forth. On the scientific plane, administration has close significance with other scholars such as history, politics, social science, psychology, and even other applied sciences.*

**Keywords:** *Administration, Governance, Islam*

## A. PENDAHULUAN

Berbicara tentang Islam, erat kaitannya dengan berbagai aspek lini kehidupan manusia. Islam hadir bukan hanya untuk kaumnya saja melainkan bagi seluruh umat manusia. Hal tersebut terrefleksi dari substansi Al-Quran yang universal. Akan tetapi, nilai Islam justru tereduksi oleh implementasi kaumnya sendiri. Islam yang begitu luas mampu melintasi ruang dan waktu terkadang terkotak-kotak oleh pemikiran manusia yang sempit dan terbatas.

Sebagai contoh Arab Saudi misalnya, merupakan sebuah Negara kiblat umat muslim berada. Tanahnya para nabi dan dianggap kota suci umat Islam sehingga berjuta-juta orang dari berbagai belahan dunia berdesak-desak hendak berhaji didalamnya. Tidak ada yang meragukan lagi bahwa Negara beribu kota Mekkah tersebut sebagai model Negara Islam. Akan tetapi, ternyata penerapan nilai Islam juga tidak totalitas didalamnya padahal Islam sendiri merupakan ajaran yang menyeru umatnya untuk mengimplementasikan nilai Islam secara kaffah.

Sejarah telah menjadi bukti, ketika Afganistan selaku negara Islam dan juga salah satu dari negeri para nabi dibombardir oleh Amerika. Pesawat mereka (Amerika) justru mendarat dan diterima baik oleh Arab Saudi di Bandaranya guna mempermudah proses invansi. Terlepas apakah tuduhan bahwa Afganistan adalah negara yang menghancurkan gedung WTC itu benar atau rekayasa, yang jelas jika dipandang dari sudut agama, Nabi Muhammad Saw pernah menjelaskan bahwa setiap muslim itu bersaudara. Tapi faktanya tindakan Arab Saudi pada saat itu seolah berkata; *"Silahkan datang Amerika, seranglah teman kami!"*

Begitu juga di Aceh, sebagai sebuah provinsi yang mengklaim bahwa dirinya adalah negeri syariat Islam justru terkekang pada dua dimensi sempit yakni 'sandang' dan 'ibadah'. Dua dimensi ini merupakan kajian Islam populer di Aceh sebab hampir semua kebijakan pemerintahnya hanya berorientasi pada dua variabel tersebut. Seperti kewajiban menutup aurat (sandang) dan perintah shalat berjamaah di Mesjid (ibadah). Hal tersebut bukan berarti penulis menganggap bahwa ibadah dan sandang tidak penting, melainkan perlu kiranya aspek lain juga diperhatikan sebab hakikatnya Islam sendiri merupakan ajaran yang memberi petunjuk pada segala lini kehidupan, seperti politik Islam, ekonomi Islam, bahkan administrasi Islam yang dominanya di Aceh masih terselenggara sistem yang liberal dan kapitalis.

## B. HAKIKAT ISLAM

Secara bahasa (secara lafaz), Islam memiliki beberapa makna. Makna-makna tersebut ada kaitannya dengan sumber kata dari "Islam" itu sendiri. Islam terdiri dari huruf dasar (dalam bahasa Arab): "Sin", "Lam", dan "Mim". Beberapa kata dalam Bahasa Arab yang memiliki huruf dasar yang sama dengan "Islam", memiliki kaitan makna dengan Islam. Dari situlah kita bisa mengetahui makna Islam secara bahasa. Jadi, makna-makna Islam secara bahasa antara lain: Al istislam (berserah diri), As salamah (suci bersih), As Salam (selamat dan sejahtera), As Silmu (perdamaian), dan Sullam (tangga, bertahap, atau taddaruj).<sup>1</sup>

Secara umum, kata *aslama* yang paling sering diimplementasi sebagai terbentuknya kata Islam. Kata tersebut yang beakar dari kata (s-l-m) disebut hingga 73 kali dalam Al-Quran. Pemeluknya disebut Muslim. Orang yang memeluk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada ajaran-Nya.<sup>2</sup>

Secara terminologis (istilah, maknawi) dapat dikatakan Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai utusan-Nya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia, di manapun dan kapan pun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>3</sup> Pemaknaan tersebut sangat erat kaitannya dengan 2 pilar utama Islam (rukun Iman dan rukun Islam).

Seorang muslim diklaim sebagai orang yang bertakwa apabila berupaya sepenuh hati dalam mengimplementasikan rukun iman dan rukun Islam. Tujuan seorang muslim pada hakikatnya adalah mencapai derajat 'takwa' tersebut. Bahkan sudah sangat jelas disebut dalam Al-Qur'an bahwa Allah Swt tidak menilai

<sup>1</sup> Misbahuddin Jamal, "Konsep Al-Islam Dalam Al-Quran", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 11. No. 2. Desember 2011, h. 287.

<sup>2</sup> Tim Sembilan, (2004). *Tafsir Maudhu'i, Al-Muntaha, jilid I*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, h. 85-86.

<sup>3</sup> Misbahuddin Jamal, "Konsep Al-Islam Dalam Al-Quran", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 11. No. 2. Desember 2011, h. 287.

hambanya dari kekayaan, jabatan, bahkan ras-nya melainkan ketakwaan sebagai pembeda seseorang itu mulia atau hina disisi-Nya.

Tidak hanya sebatas makna 'takwa', relevansi relatif antara rukun iman dan rukun Islam turut mewarnai defenisi individualis seorang hamba. Jika rukun Iman diterapkan tanpa dukungan rukun Islam mereka disebut orang yang 'fasik'. Jika rukun Islam yang diterapkan tanpa adanya rukun iman maka mereka disebut orang 'munafik'. Sedangkan oknum yang tidak menerapkan keduanya (rukun iman dan Islam) merekalah yang dikenal sebagai orang yang 'kafir'.

Seperti maknanya, Islam itu sangatlah luas bahkan melampaui defenisinya sendiri. Seorang non-muslim sekalipun memiliki nilai Islam (potensial) jika Ia menerapkan nilai-nilai kebaikan. Sebagai contoh, dalam istilah ilmu tauhid; derajat paling tinggi adalah kalimat 'Lailla hailallah' sedangkan paling rendah adalah membuang duri di jalan. Jadi meskipun seorang kafir atau ateis pun Ia, jika berupaya membuat kemaslahatan maka dianggap memiliki nilai keislaman didalam dirinya. Sehingga tidak sewajarnya seorang individu muslim mengkafirkan individu yang lain dan menganggap dirinya paling terbaik dan memandang sebelah mata kaum lainya. Sebab, bukan tidak mungkin mereka yang kafir justru akan terketuk hatinya menjadi muslim jika melihat umat muslim yang bersifat lemah lembut dan penuh kasih sayang persaudaraan.

Mungkin itulah sebabnya, walaupun dalam Islam, tauhid (aqidah) merupakan fondasi dasar, tujuan utama nabi Muhammad justru diutus kedunia bukan untuk mengajarkan nya, (tauhid), melainkan untuk menyempurnakan ahklak manusia. Sebagaimana hadis yang berbunyi;

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ.

Artinya; "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan ahklak manusia." <sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> HR. Al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrad no. 273 (Shahiihul Adabil Mufrad no. 207), Ahmad (II/381), dan al-Hakim (II/613), dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 45).

Hal ini bukan mengatakan bahwa tauhid kalah penting dengan ahklak, melainkan tugas tauhid sudah diajarkan pada nabi-nabi sebelumnya, bahkan sejak nabi Adam As. Islam kemudian menjadi sempurna ketika Rasulullah Saw diturunkan sebagai penutup para nabi serta penyempurna ajaran-Nya. Hanya saja, dimensi ahklak merupakan ranah multi sosial yang berbeda objek kajian dengan ranah ketuhanan. Bukankah Allah Swt menyeru umatnya tidak hanya beramal secara vertikal melainkan juga secara horizontal (*hablum minallah dan hablum minannas*)?

Hal ini sangat relevan jika dinilai dari persepektif masa kini. Seorang non-muslim justru akan tertarik masuk Islam karena ahklak dan pribadi yang baik. Sebab dakwah yang dilakukan dengan jalur pemaksaan apalagi 'pedang' justru membuat pihak lain takut dengan Islam (fenomena saat ini) yang bahkan tak jarang mereka kaum luar (*outsider*) mengklaim bahwa Islam adalah agama teroris. Terlepas apakah itu dominasi efek media global yang dipegang oleh barat atau bukan, yang jelas dari dalam Islam itu sendiri masih banyak yang meyakini bahkan berbangga diri bahwa Islam itu adalah ajaran yang dijalankan dengan kekerasan fisik (jihad).

Contoh lain, zaman sekarang, jika seorang muslim hendak mendakwahkan Islam kepada pihak non-muslim melalui pendekatan Al-Quran dan hadis justru adalah sarana yang kurang efektif. Bukan berarti penulis menomor-dua-kan Al-Quran, hanya saja secara strategi dakwah *zamannow* tentu kontekstualisasinya berbeda dengan era Rasulullah Saw. Pada masa rasul, syair arab merupakan sebuah keluarbiasaan bagi masyarakat pada masa itu. Bahkan, sebuah syair yang dibuat oleh seseorang mampu mengangkat derajatnya menjadi pihak terpandang dan dihormati. Kemudian Al-Quran diturunkan dengan keindahan bahasa yang luarbiasa, menjadikan sangat efektif dimasa itu bila dakwah membawa ayat-ayat. Pada masa sekarang, jika pendakwah membawa ayat atau hadis ketika berdebat dengan non-muslim, justru mereka semakin tidak percaya dengan Islam. Sebab

didalam hati mereka sudah meyakini sejak wal bahwa kitab suci agama lain adalah ajaran yang salah, sebagaimana kita meyakini bahwa kita mereka juga ajaran yang keliru.

Oleh sebab itu dibutuhkan pendekatan rasional plus emosional terstruktur. ketika akal mereka sudah menyadari bahwa Islam mengajarkan kebenaran secara bertahap, fase selanjuta Al-Quran sudah bisa masuk guna memperkuat keyakinan mereka terhadap Islam. Lebih efektif lagi adalah ketika mereka (non-muslim) sudah simpati apalagi jatuh hati dengan Islam. Nah, simpati itu paling rentan dan sering terjadi melalui media ahklak yang indah yang memikat hati siapa saja. Sehingga substansi diturunkannya Rasulullah Saw sebagai penyempurna ahklak manusia sudah sangat kompentibel dan tak perlu diragukan lagi.

### C. HAKIKAT PEMERINTAH

Secara etimologi, pemerintah berasal dari: Kata dasar "pemerintah" berarti melakukan pekerjaan menyeluruh. Penambahan awalan "pe" menjadi "pemerintah" berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Dari segi ilmu politik, pemerintah (*government*) secara etimologis berasal dari kata Yunani, "kubernan" atau nakhoda kapal. Artinya, menatap ke depan. Kemudian "memerintah" yang berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat ke tujuan yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>

Secara terminology, pemerintah merupakan sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan

---

<sup>5</sup> Ramlan Surbakti, (1999). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, h.167.

dan kesejahteraan rakyat dan Negara. Pemerintah adalah organisasi kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislative dan yudikatif.<sup>6</sup>

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata dasar pemerintah, yang paling sedikit kata “ perintah “ tersebut memiliki empat unsure yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Apabila dalam suatu negara kekuasaan pemerintah, dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan ( disebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif ).<sup>7</sup> Pemerintahan tersebut merupakan satu dari 4 unsur terbentuknya suatu negara yakni kedaulatan. Sedangkan aspek lainnya adalah adanya daerah, adanya rakyat (bangsa) dan adanya pengakuan dari negara lain.

---

<sup>6</sup> Muhadam Labolo, (2006). *Memahami Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 22.

<sup>7</sup> Inu kencana syafiie, (2001). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Refika Aditama, h. 20.

#### D. HAKIKAT ADMINISTRASI

Secara etimologis istilah administrasi berasal dari bahasa Inggris, dari kata *Administration* yang bentuk infinitifnya adalah *administer*. Kata Administrasi juga berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Administratie* yang mempunyai pengertian mencakup *stelselmatige verkrijging en verwerking van gegeven* (tata usaha), *bestuur* (manajemen dari kegiatan-kegiatan orang), *beheer* (manajemen dari sumber daya, seperti financial, personel, gudang).<sup>8</sup> Jadi administrasi secara etimologi adalah suatu kegiatan yang berorientasi pada ranah tata usaha, manajemen, struktural aktivitas manusia terkait pengelolaan finansial, personal, sumber daya dan lain sebagainya.

Secara terminologi, administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh sekelompok manusia (dua orang atau lebih) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>9</sup> Kelompok disini bisa bersifat pemerintahan, publik, swasta, maupun pekerjaan warga sipil. Jadi, administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan tindakan oleh badan atau pejabat pemerintah terkait kepentingan kenegaraan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.

Administrasi terbagi dua, yakni administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Dalam arti sempit, administrasi hanya meliputi kegiatan surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda yang bersifat teknis ketatausahaan (*Clerical Work*).<sup>10</sup> Dari definisi tersebut dapat disimpulkan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan. Administrasi

---

<sup>8</sup> Sondang P. Siagian, (2006). *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, h. 2.

<sup>9</sup> Sondang P. Siagian, (1974). *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, h. 2.

<sup>10</sup> Soewarno Handayani, (1998). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung, h. 2.

dalam arti luas menurut The Liang Gie, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu, adanya manusia yang melakukan kerjasama serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>11</sup> Jadi, makna luas pada administrasi adalah makna sempit yang diikutsertakan fungsi eksternal dari surat menyurat itu sendiri. Baik itu latarbelakang surat, tujuan surat, manfaat surat, deadline surat, dan lain sebagainya.

### E. SIGNIFIKANSI ISLAM DAN ADMINISTRASI

Berbicara soal administrasi mungkin notabene seolah lebih cocok kepada ilmu umum (ekonomi, akutansi) dibanding ilmu keislaman. Padahal, Islam sejatinya tidak melakukan dikotomi ilmu, persepsi manusia yang memisahkannya. Bahkan sekaliber imam Al-Ghazali dinilai telah mengkotak-kotakkan dimensi ilmu dengan variable ilmu '*fardhu ain*' dan '*fardhu kifayah*'. Pemisahan ini tentu berdampak besar bagi para pengikutnya sehingga hanya mempelajari ilmu yang bersifat akhirat semata (*fardhu ain*).

Hakikatnya ilmu itu sama pentingnya, sebagaimana Islam yang menyeru umatnya untuk menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Sadar atau tidak kehidupan dunia-akhirat merupakan dualism yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan seperti halnya dua sisi berbeda pada satu koin. Konsep akhirat tak akan pernah ada tanpa dimulai dari konsep dunia, sedangkan konsep dunia tidak akan pernah memperoleh keadilan yang sempurna tanpa adanya konsep akhirat.

Sebagai contoh, Hitler misalnya. Ia telah membunuh manusia hingga mencapai 5 juta jiwa dimasanya. Jika menggunakan konsep dunia, tentu tidak ada sanksi yang setimpal untuk menghukumnya. Bahkan dalam Islam jika diberlakukan qisas, maka hukuman mati bagi Hitler hanya menebus satu nyawa yang telah direngutnya. Bagaimana dengan 4.999.999 jiwa lainnya? Oleh sebab itu

---

<sup>11</sup> Daryanto, (2005) *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 7.

konsep akhirat menjadi solusi. Di akhirat kelak, tidak sulit bagi Allah Swt menghukum mati Hitler kemudian menghidupkannya lagi, kemudian mematikannya lagi berulang-ulang hingga 5 juta kali sebagai balasan dari prilakunya di dunia.<sup>12</sup>

Begitu juga dalam ranah administrasi, dalam arti sempit jika administrasi itu bermakna urusan surat-menyurat, maka Islam juga sudah mengimplementasikannya ketika para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat Al-Quran pada pelepah kurma, kulit binatang atau item lainnya. Lebih luas, penerapan administrasi semakin kentara ketika Islam sudah memegang kekuasaan, adanya kekuasaan dibutuhkan aturan untuk mengatur jalannya pemerintahan, proses tersebut tentu tidak dapat berjalan dengan baik tanpa ada fungsi dan peran nilai administrasi didalamnya. Jadi signifikansi Islam yang dimaksud disini adalah keterkaitan atau hubungan timbal balik dalam upaya menggali dan mengeksplorasi nilai-nilai antara administrasi dan pemerintahan Islam.

## G. MANFAAT STUDI ADMINISTRASI PEMERINTAH

Pada dasarnya ilmu administrasi tumbuh dan berkembang sejalan dengan pola pikir manusia, tidak hanya sebatas ilmu administrasi namun juga sebagai suatu pekerjaan atau profesi yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Proses administrasi baik secara sistematis maupun manual personal diharapkan mampu menjawab tantangan profesionalitas yang sudah mulai langka di zaman kotemporer. Administrasi sendiri pada hakikatnya berfungsi mengatur dan menata pembagian kerja dalam beragam corak suatu lembaga tertentu. Seni administrasi dapat dilihat dari keberagaman aplikasi nilai administrasi yang tidak selalu ekuivalen antara satu perusahaan dengan perusahaan walau mereka bersumber dari induk perusahaan yang sama sekalipun.

---

<sup>12</sup> Zakir Naik, (2016). *Mereka Bertanya Islam Menjawab*, terj. Nur Cholis, dkk, Solo: Penerbit Aqwam, h. 34.

Sebagai contoh, kebijakan Baitul Mal kampung dalam memilih masyarakat yang layak memperoleh zakat mal tidak selalu sama antara satu desa dengan desa lainnya. Padahal, mereka memperoleh penyuluhan dan otoritas yang sama dari pihak Baitul Mal yang lebih tinggi. Terlepas dari sisi subjektivitas atau tidak, namun secara objektif sekalipun tidak akan ditemukan pengelolaan administrasi yang serupa. Sebagian desa ada yang menilai katagori miskin dari rekening listrik, ada yang dari kepemilikan rumah, ada juga yang melihat aspek tanggungan atau beban kepala keluarga. Realitanya, meskipun kriteria fakir atau miskin itu sudah ada indikatornya, namun tetap saja masih ada penerimaan zakat mal yang dinilai salah alamat (tidak sesuai). Sebab terkait masalah dapur (keuangan pribadi), hanya elemen keluarga itu sendirilah yang paling paham betul akan kekurangan atau kelebihannya.

Kendatipun administrasi tidak bisa berjalan secara sempurna, namun peran administrasi sangat krusial dalam mengelola dan mengatur sistem pemerintahan. Dibeberapa daerah di Indonesia sering kita dengar adanya korban meninggal dunia akibat berdesak-desakan dalam mengantri zakat. Fenomena menyedihkan ini bisa terjadi karena pihak penyelenggara tidak menerapkan sistem administrasi dengan baik dan benar. Padahal, jika nilai administrasi dikelola dengan baik, dana dari para dermawan dapat tersalurkan ke tangan yang berhak tanpa harus mengimplementasikan budaya antri, apalagi sampai memakan korban jiwa.

Selain mengatur dan mengelola sistem, administrasi juga berguna sebagai media evaluasi dari keberhasilan perencanaan suatu program pemerintah. Dengan adanya ilmu administrasi, para karyawan dapat menilai sejauh mana visi dan misi lembaga sudah terlaksana, apakah lebih baik atau justru semakin merosot. Perencanaan adalah keseluruhan proses dan penentuan keputusan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa akan datang dalam rangka pencapaian tujuan.<sup>13</sup> Dengan demikian apabila dikaitkan dengan sistem pemerintahan, maka perencanaan administrasi pemerintah dapat diartikan sebagai

<sup>13</sup> AW. Widjaya, (1987). *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*, Jakarta: Bina Aksara, h. 33.

penerapan analisis yang teratur dan terdata untuk terlaksananya proses pengembangan sistem pemerintahan sehingga bermanfaat bagi setiap elemen didalamnya.<sup>14</sup> Oleh sebab itu landasan perencanaan sangat dibutuhkan sebagai salah satu dari manfaat mempelajari ilmu administrasi.

Dengan demikian landasan perencanaan adalah kemampuan manusia secara sadar untuk memilih alternatif masa depan yang dikehendaki, selanjutnya berupaya untuk mewujudkan masa depan yang dipilihnya sehingga suatu rencana dapat direalisasikan dengan baik.<sup>15</sup> Dari deskripsi di atas jelaslah bahwa kegiatan merencanakan merupakan langkah awal dari pola administrasi pemerintah untuk menentukan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.<sup>16</sup> Tanpa perencanaan ibarat berlayar tanpa peta, sehingga nahkoda akan kesulitan menemukan posisi ideal untuk berlabuh. Begitu juga dalam orientasi administrasi pemerintah. Tanpa adanya perencanaan tentu akan sulit terealisasinya impian yang ditargetkan secara maksimal dan efektif.

Manfaat mempelajari administrasi pemerintah juga dapat berperan sebagai media *organizing* (pengorganisasian). Sebagaimana defenisi administrasi dalam arti luas tak akan terlaksana tanpa adanya sebuah pengorganisasian yang terarah. Langkah awal dalam pengorganisasian diwujudkan melalui perencanaan dengan menetapkan bidang-bidang atau peran administrasi yang mencakup dimensi kegiatan yang akan diselenggarakan oleh suatu kelompok kerjasama tertentu.

Oleh karena itu, setiap unit kerja akan menggambarkan jenis-jenis aktivitas yang menjadi kewajibannya untuk diwujudkan. Adapun wujud dari pelaksanaan *organizing* ini adalah tampaknya kesatuan yang utuh, kekompakan, kesetiakawanan dan terciptanya mekanisme yang sehat sehingga kegiatan lancar, stabil dan mudah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> ST. Vembriarto, (1998). Pengantar Perencanaan Pendidikan: Educational Planning, Yogyakarta: Andi Offset, h. 39.

<sup>15</sup> M. Bukhari, dkk, (2005). *Azas-Azas Manajemen*, Yogyakarta: Aditya Media, h. 35-36.

<sup>16</sup> M. Yacoeb, "Konsep Manajemen Dalam Perspektif Al-Quran: Suatu Analisis dalam Bidang Administrasi Pendidikan", *Jurnal Ilmiah Didaktika*, Agustus 2013, Vol. XIV. No. 1. hlm. 77.

<sup>17</sup> Jawahir Tanthowi, (1983). *Unsur-Unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, h. 71.

Dalam Islam, proses organizing yang menekankan pentingnya kesatuan dalam segala tindakan, dalam hal ini al-Qur'an telah menyebutkan betapa pentingnya tindakan kesatuan yang utuh, murni dan bulat dalam suatu organisasi. Selanjutnya Al-Quran memberikan petunjuk agar dalam suatu wadah, tempat, persaudaraan, ikatan, organisasi, kelompok, janganlah menimbulkan pertentangan, perselisihan, percekocokan yang mengakibatkan hancurnya kesatuan, serta runtuhnya mekanisme kepemimpinan yang telah dibina.<sup>18</sup> Hal ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran sebagaimana Allah Swt Berfirman:

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya: "Dan taatilah Allah dan RasulNya, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar, hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar" (QS. Al-Anfaal: 46).

Manfaat mempelajari administrasi selanjutnya adalah *actuating* (pelaksanaan/pergerakan). Aktuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Aktuating adalah pelaksanaan untuk bekerja, dalam pelaksanaannya, secara fisik kegiatan dari aktivitas tersebut, maka pimpinan mengambil tindakan-tindakannya kearah itu. Seperti: *Leadership* (pimpinan), perintah, komunikasi dan *conseling* (nasehat). Aktuating disebut juga 'gerakan aksi' yakni mencakup kegiatan yang dilakukan seorang pimpinan untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Dari seluruh rangkaian proses administrasi atau manajemen, pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi administrasi yang paling utama.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> M. Yacoeb, *Konsep Manajemen...*, h. 80.

<sup>19</sup> Rahman,dkk, (2011). *Actuating dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*, Lampung: Universitas Negeri Lampung, h. 23. Lihat juga: Sondang P. Siagian, (1997). *Sistem Informasi untuk Mengambil Keputusan*, Jakarta: Gunung Agung, h. 88.

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa *actuating* adalah mengelola lingkungan organisasi yang melibatkan lingkungan dan orang lain dengan tata cara yang baik. Al-Quran dalam hal ini telah memberikan fondasi dasar terhadap proses bimbingan dan pengarahan ataupun memberikan peringatan dalam bentuk *actuating*. Penjelasan tersebut sesuai dengan firman Allah Swt:

فَيَّمَّا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

Artinya: "Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik" (QS. Al-Kahfi: 2)

Terakhir, manfaat mempelajari administrasi adalah sebagai media evaluasi (*controlling*). Evaluasi dalam konteks administrasi adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Evaluasi dalam administrasi pemerintah Islam ini mempunyai dua batasan, yaitu; *Pertama*, evaluasi merupakan proses kegiatan untuk menentukan kemajuan sistem pemerintahan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan; *kedua*, evaluasi yang adalah usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik (*feedback*) dari kegiatan yang telah dilakukan. Evaluasi dalam Administrasi Islam ini mencakup dua kegiatan, yaitu penilaian dan pengukuran berbasis syariah. Agar dapat menentukan nilai dari sesuatu, maka dilakukan pengukuran dan wujud dari pengukuran itu adalah pengujian.<sup>20</sup>

Dalam bingkai ilmu administrasi, *controlling* merupakan jembatan terakhir dalam rantai fungsional dari kegiatan-kegiatan manajemen. Pengendalian merupakan salah satu cara para manajer untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan organisasi tercapai atau tidak dan mengapa tercapai atau tidak tercapai. Selain itu, *controlling* adalah konsep pengendalian, pemantauan efektivitas dari perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan serta pengambilan keputusan pada saat

---

<sup>20</sup> M. Jacob, *Konsep Manajemen...*, h. 82.

dibutuhkan.<sup>21</sup> Adapun ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan evaluasi (controlling) dapat dilihat dari ayat berikut:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: "Padahal sesungguhnya bagi kamu terdapat beberapa malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Infithar: 10-12)

## H. HUBUNGAN ADMINISTRASI DAN ILMU LAINNYA

Dalam arti luas, sejatinya semua ilmu itu memiliki satu kesamaan mutlak yakni sama-sama bersumber dari sang maha tahu yakni Allah Swt. Allah yang menganugrahkan manusia mampu berfikir, mampu bertindak berdasarkan keinginannya, serta mampu mempelajari ilmu sebagai salah satu berkah dari Allah Swt. Namun dalam arti sempit, secara praktis keterkaitan antara ilmu administrasi dengan keilmuan lainnya tidak terlepas dari sejauh mana peran ilmu itu sendiri dalam menembus batas-batas disiplin ilmu yang lain yang sudah menjadi mainstream pada umumnya.

Bisa dikatakan, peran administrasi sangat vital bagi beberapa studi keilmuan saat ini. Hal tersebut tidak terlepas dari urgensi administrasi yang sangat kentara khususnya di zaman digital seperti saat sekarang ini. Tanpa adanya administrasi, disiplin ilmu terkait akan sulit memformulasikan kondisinya sehingga mencapai arah yang kondusif (setabil). Adapun beberapa ilmu yang berhubungan erat dengan administrasi pada umumnya adalah ilmu Bahasa, ilmu Manajemen, Akutansi, Kepustakaan, dan lain-lain. Sedangkan disiplin ilmu yang terkait dengan administrasi pemerintah diantaranya; ilmu politik, ilmu ekonomi, psikologi, sosiologi, dan antropologi.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Asep Kardiwa, (2012). *Perbandingan Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka Setia, h. 61-62.

Administrasi erat hubungannya dengan ilmu politik karena keduanya membahas kebijakan politik pemerintahan suatu negara. Demikian pula dengan ilmu ekonomi, sangat signifikan karena keduanya berbicara mengenai penyelenggaraan negara dan pemberdayaan ekonomi negara. Adapun hubungannya dengan psikologi adalah dalam hal tingkah laku bernegara, karena tingkah laku merupakan bagian dari kajian psikologi. Ilmu administrasi juga berhubungan dengan sosiologi yang mengkaji struktur masyarakat, hierarki kekuasaan, dan dampaknya terhadap perkembangan sosial. Demikian pula, dengan antropologi, karena administrasi pemerintah sebagai bagian dari produk kebudayaan, produk pola pikir, dan pola hidup masyarakat, pemerintah, dan politisi dalam negara yang sedang berusaha membangun prinsip demokrasi dan kebudayaan yang mapan dalam bernegara.<sup>23</sup> Jika dikaitkan dengan Islam, ilmu administrasi memiliki keterkaitan dengan ilmu SKI (Sejarah Kebudayaan Islam), sebab tidak ada tema dalam administrasi Islam yang tidak menyinggung aspek sejarah pemerintahan Islam terkhusus pada zaman Rasulullah Saw.

#### **a. Administrasi dan Ilmu Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)**

Kata sejarah dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau.<sup>24</sup> Sejarah adalah sebuah ilmu yang berusaha menemukan, mengungkapkan, serta memahami nilai dan makna budaya yang terkandung dalam peristiwa-peristiwa masa lampau.<sup>25</sup> Pengertian lain tentang sejarah adalah catatan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau mencakup perjalanan hidup manusia dalam mengisi perkembangan dunia dari masa ke masa.<sup>26</sup> Sedangkan Sejarah kebudayaan Islam merupakan peristiwa atau kejadian pada masa lalu yang memiliki nilai Islam baik dalam aspek literasi, metodologi, serta aksiologi.

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) bisa diartikan juga sebagai catatan perkembangan perjalanan hidup manusia muslim dari masa ke masa dalam beribadah,

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Depdiknas, (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h. 14.

<sup>25</sup> Dudung Abdurahman, (2007). *Metodologi Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, h. 14.

<sup>26</sup> Departemen Agama Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, (2005). *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Depag, h. 1.

bermuamalah dan berakhlak serta dalam mengembangkan sistem kehidupan atau menyebarkan ajaran Islam yang dilandasi oleh akidah.<sup>27</sup> Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) lebih mengeksplorasi potensi pembelajaran dari sejarah Islam, baik dalam konteks pembelajaran pada tokoh Islam, maupun fenomena yang terjadi di dalamnya dalam orientasi agama, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain-lain.

Dalam media pembelajaran di sekolah, baik dari tingkat dasar maupun perguruan tinggi, SKI tak pernah kehilangan eksistensinya sebagai muatan belajar-mengajar. Hal tersebut mengindikasikan begitu urgensinya peran mata pelajaran SKI dalam ranah edukasi pendidikan di Indonesia. Pada hakikatnya, mata pelajaran/ mata kuliah SKI memiliki peran sentral dalam memotivasi pelajar untuk memahami, dan mengenal sejarah Islam yang memiliki nilai positif dalam membentuk karakter dan kepribadian individu.

Keterkaitan ilmu administrasi umum dengan SKI tidak terlalu dominan, namun jika sudah ditandemkan dengan Islam (administrasi Islam) maka hubungan antara keduanya sangat erat bahkan saling mendukung satu sama lain. Administrasi berbicara sistem, sedangkan Islam tak terlepas dari aspek sejarah masa lalu. Sebab literatur Islam sendiri tak akan pernah jauh dari pembahasan sejarah Islam yang merupakan muatan dari nilai-nilai pembelajaran SKI. Hubungan administrasi pemerintah Islam juga sangat berpedoman dari faktor sejarah pemerintah Islam pada masa Rasulullah Saw hingga masa pemerintahan Islam selanjutnya. Sehingga, jika membahas tentang aturan tata negara, sistem zakat, rampasan perang dan lain sebagainya semuanya selalu merujuk dengan fenomena masa lalu yang merupakan bagian dari studi ilmu SKI.

## **b. Administrasi dan Ilmu Politik**

Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis yang berarti kota yang berstatus negara kota (city state).<sup>28</sup> Dalam negara-negara kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai

<sup>27</sup> Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah, h. 37.

<sup>28</sup> Hidajat Imam, (2009). *Teori-Teori politik*, Malang: Setara press, h. 2.

kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya.<sup>29</sup> Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama.

Secara terminologi, menurut Deliar Noer, politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.<sup>30</sup> Melihat definisi ini, maka hakekat politik menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas, ataupun sikap, yang tentunya bertujuan akan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti kekuasaan bukanlah hakekat politik, meskipun harus diakui tidak dapat dipisahkan dari politik, justru politik memerlukannya agar suatu kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat.<sup>31</sup>

Kaitan antara ilmu politik dengan ilmu administrasi negara, Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang strategi atau siasat, atau lebih pula disebutkan sebagai pelajaran terinci dari berbagai cara merebut kekuasaan atau juga usaha pembahasan yang teratur untuk menemukan pencegahan kebingungan yang kacau dalam pengertian yang lebih umum hubungannya. Oleh karena itu objeknya adalah kekuasaan, karena dalam rangka peraturan negara dalam rangka peraturan negara agar terjadi ketertiban maka untuk mencegah perjudian, pelacuran, pencurian, penindasan, maka diperlukan dalam negara itu suatu kekuasaan untuk mengantisipasinya.<sup>32</sup>

Hubungan antara ilmu politik dan ilmu administrasi negara sangat erat karena objek materialnya sama yaitu negara itu sendiri, sedangkan untuk

---

<sup>29</sup> Basri Seta, (2011). *Pengantar Ilmu Politik*, Jogjakarta: Indie Book Corner, h 2.

<sup>30</sup> Deliar Noer, (1983). *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta : Rajawali, h. 6.

<sup>31</sup> Abdulkadir B. Nambo dan Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa, "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)" , *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. XXI. No. 2 April - Juni 2005, hlm. 265.

<sup>32</sup> Prajudi Atmosudirdjo, (1982). *Administrasi dan Management Umum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 272.

membedakannya dilihat dari objek formalnya yang menjadi sudut pandang (*focus of interest*) yang membedakan kedua disiplin ilmu ini. Ilmu politik sudut pandangnya adalah kekuasaan, sedangkan ilmu administrasi negara sudut pandangnya adalah sistem pelayanan penyelenggaraan administrasi dan organisasi publik itu sendiri, oleh karena itu akan menjadi kajian para birokrat, politikus, dan negarawan. Dengan begitu antara ilmu politik dengan ilmu administrasi negara walaupun sama-sama membahas negara sesuai objek materinya tetapi objek formanya berbeda bertolak belakang dengan karena; antara kekuasaan dengan pelayanan bertolak belakang.<sup>33</sup>

Hubungan antara ilmu politik dengan administrasi negara juga terlihat dari banyak nya timbul masalah-masalah dan kekerasan-kekerasan di kalangan masyarakat, karena kegiatan administrasi negara terlebih lagi karena banyak nya campur tangan politik pada kehidupan masyarakat. Syarat-syarat penunaian tugas, fungsi kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab para pejabat administrasi negara diantaranya ditentukan oleh keberadaan politik praktis itu sendiri, yaitu bahwa perbuatan para administrasi negara tidak boleh bertentangan dengan budaya politik yang berlaku, kalau tidak demikian akan dianggap terobosan yang akan berakibat kegoncangan politik sendiri.<sup>34</sup>

Hubungan ilmu administrasi pemerintah juga dapat terlihat jelas dalam kontitusi dasar suatu negara. Peraturan dasar seperti UUD 1945 misalnya, merupakan sebuah bentuk aturan hukum tertinggi di Indonesia yang bisa terkemas sedemikian rupa karena adanya ilmu administrasi pemerintah. Perkembangan dari UUD 1945 tersebut kemudian melahirkan cabang peraturan lain seperti UU KUHP dan sejenisnya. Bagi kalangan politikus, kerap menggunakan peraturan dan norma-norma tersebut dalam menjalankan dinamika politiknya. Singkatnya, ilmu administrasi pemerintah menjadi jembatan penghubungnya nilai-nilai konstitusi dengan oknum politik.

### c. Administrasi dan Ilmu Sosial

Menurut Roucek dan Warren ilmu sosial atau formalnya sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Sedangkan

<sup>33</sup> Arif Abdurahman, (2010). *Majalah Administrasi Negara, No. 2 Tahun 1959*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 77.

<sup>34</sup> Inu kencana syafiie, (2013). *Ilmu Politik*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, h 49-50.

menurut Soemardjan dan Solaeman Soemardi menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.<sup>35</sup> Kedua defenisi di atas memiliki substansi yang sama yakni sama-sama menjelaskan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang membahas tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya.

Ilmu sosial, dalam mempelajari aspek-aspek masyarakat secara subjektif, inter-subjektif, dan objektif atau struktural, sebelumnya dianggap kurang ilmiah bila dibanding dengan ilmu alam. Namun sekarang, beberapa bagian dari ilmu sosial telah banyak menggunakan metode kuantitatif. Demikian pula, pendekatan interdisiplin, dan lintas-disiplin dalam penelitian sosial terhadap perilaku manusia serta faktor sosial, dan lingkungan yang mempengaruhinya telah membuat banyak peneliti ilmu alam tertarik pada beberapa aspek dalam metodologi ilmu sosial.<sup>36</sup>

Hubungan ilmu sosial dan administrasi paling kentara dapat dilihat pada peran manusia dalam memenuhi syarat legalitas dirinya sebagai suatu penduduk di suatu negara. Administrasi mengurus persoalan surat-menyurat, sedangkan surat tersebut dilakukan oleh sesama manusia sebagai unsur dari pelaku sosial. Ketika administrasi melayani kepentingan rakyat dan masyarakat, disanalah terletak relasi antara ilmu administrasi dan ilmu sosial.

Hubungan ilmu sosial dengan administrasi pemerintah, dapat dilihat ketika urusan administrasi tersebut sudah menyangkut otoritas pemerintah dalam menata rakyatnya. Perlu diperhatikan bahwa peran administrator (pelaku administrasi) menjadi bagian sentral dalam mengadakan teknik pendekatan masyarakat, yang dibutuhkan ilmu sosial didalamnya. Sebaliknya, oknum yang diperintah (rakyat) juga berperan dalam bersikap sosial, apakah mereka bersedia untuk dipimpin, diurus dan diatur dalam hubungan antar manusia pada kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya. Jadi dalam hal ini pemerintah juga akan dianggap sebagai salah satu dari bagian dari kumpulan manusia. Perbedaannya adalah pemerintah merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, sedangkan masyarakat adalah objek yang diperintah.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, (2001). *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 20.

<sup>36</sup> Hebe Vessuri, "Ethical Challenges for the Social Sciences on the Threshold of the 21st Century," *Current Sociology*, Vol. 50, no. 1. January 2000, h. 135-150.

Hubungan ilmu sosial dan administrasi Islam, bisa ditemukan pada kegiatan administrasi yang menerapkan dimensi Islam didalamnya. Sebagai contoh dalam pengurusan pernikahan, dibutuhkan kolerasi antara nilai keislaman dan administrasi pemerintah. Pasangan yang menikah dianggap tabu apabila menikah hanya sebatas urusan agama saja (nikah siri), oleh sebab itu dibutuhkan peran agama, pemerintah, dan administrasi agar urusan pernikahan dianggap baik dan benar dalam pandangan Islam, pemerintah, maupun sosial. Hubungan lainnya dapat dilihat pada pengurusan zakat, infak, perceraian, dan lain sebagainya yang tidak terlepas dari kontribusi antara ilmu sosial dan ilmu administrasi Islam didalamnya. Semua itu dilakukan agar proses pelaksanaannya dapat berjalan secara solutif baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum bernegara (administrasi publik).

#### **d. Administrasi dan Ilmu Psikologi**

Psikologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani; '*Psychology*' yang merupakan gabungan dan kata *psyche* dan *logos*. *Psyche* berarti jiwa dan *logos* berarti ilmu. Secara harafiah psikologi diartikan sebagai ilmu jiwa. Istilah *psyche* atau jiwa masih sulit didefinisikan karena jiwa itu merupakan objek yang bersifat abstrak, sulit dilihat wujudnya, meskipun tidak dapat dimungkiri keberadaannya. Dalam beberapa dasawarsa ini istilah jiwa sudah jarang dipakai dan diganti dengan istilah psikis.<sup>37</sup>

Secara terminology, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan. Tingkah laku terbuka adalah tingkah laku yang bersifat psikomotor yang meliputi perbuatan berbicara, duduk, berjalan dan lain sebagainya, sedangkan tingkah laku tertutup meliputi berfikir, berkeyakinan, berperasaan dan lain sebagainya.<sup>38</sup>

Berdasarkan objek materialnya, sosiologi dan psikologi sama-sama membahas tentang manusia. Jika ilmu sosial membahas hubungan eksternal manusia, psikologi cenderung membahas sisi internal manusia. Lengkapnya, jika sosiologi membahas hubungan manusia dengan manusia lainnya, ilmu psikologi

<sup>37</sup> Dakir, (1993). *Dasar-Dasar Psikologi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 12.

<sup>38</sup> Muhibbinsyah, (2001). *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 21.

membahas tentang persolanan manusia dengan kejiwaannya sendiri. Jiwa ini yang kemudian membentuk watak dan karakter sejati manusia pada umumnya.

Hubungannya dengan ilmu administrasi tentu tidak bisa dikaitkan secara langsung. Sebab, administrasi cenderung beredar dikawasan fisik (lahir) sementara psikologi sering bermain diwilayah alam bawah sadar manusia (batin). Orang yang psikologinya sehat, secara langsung dari dalam dirinya akan mengimplementasikan praktek administrasi secara totalitas dan professional. Jika tidak, maka mereka cenderung bekerja hanya sebatas menghabiskan waktu kerjanya saja agar memperoleh gaji setiap bulannya. Lebih buruknya lagi, masih banyak oknum yang menyalahgunakan legalitas dan prosedur administrasi demi kepentingan pribadi.

Bisa dikatakan, pelaku administrasi yang membuat surat palsu misalnya, merupakan refleksi dari nilai psikologi yang tidak sehat dalam dirinya. Jika seorang individu memiliki jiwa yang sehat, apalagi dengan dorongan motivasi beragama, tentu tidak akan menyalahgunakan posisinya sebagai penyandang amanah pemerintah. Jadi, hubungan psikologi dalam ilmu administrasi adalah sebagai media control agar mental pelaku administrasi tetap berjalan di jalurnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir B. Nambo dan Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa, “*Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)*” , Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. XXI. No. 2 April – Juni 2005, hlm. 265.
- Arif Abdurahman, (2010). *Majalah Administrasi Negara*, No. 2 Tahun 1959. Jakarta: Rineka Cipta
- Asep Kartiwa, (2012). *Perbandingan Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia
- AW. Widjaya, (1987). *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara
- Basri Seta, (2011). *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta: Indie Book Corner
- Dakir, *Dasar-Dasar Psikologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Daryanto,(2005). *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Deliar Noer, (1983). *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta : Rajawali
- Departemen Agama Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, (2005). *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta, Depag

- Depdiknas. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Dudung Abdurahman, (2007). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Hebe Vessuri, "Ethical Challenges for the Social Sciences on the Threshold of the 21st Century," *Current Sociology*, Vol. 50, no. 1. January 2000
- Hidajat Imam, (2009). *Teori-Teori politik*. Malang: Setara press
- HR. Al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrad no. 273 (Shahiihul Adabil Mufrad no. 207), Ahmad (II/381), dan al-Hakim (II/613), dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 45).
- Inu kencana syafiie, (2001). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- Inu kencana syafiie, (2013). *Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Jawahir Tanthowi, (1983). *Unsur-Unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka al-Husna
- Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah
- M. Bukhari, dkk, (2005). *Azas-Azas Manajemen*. Yogyakarta: Aditya Media
- M. Yacoeb, "Konsep Manajemen Dalam Perspektif Al-Quran: Suatu Analisis dalam Bidang Administrasi Pendidikan", *Jurnal Ilmiah Didaktika*, Agustus 2013, Vol. XIV. No. 1
- Misbahuddin Jamal, "Konsep Al-Islam Dalam Al-Quran", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 11. No. 2. Desember 2011.
- Muhadam Labolo, (2006). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muhibbinsyah,(2001). *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Murziqin, R. (2013). Legal Reform Based on Federal Evidence Rules. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), 140-165
- Murziqin, R. (2015). Government Authority in the Application of Islamic Sharia. *Journal of Islamic Law and Culture*, 13(2), 321-332
- Murziqin, R. (2016). Aceh Pasca MoU Helsinki. *Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science*. 2(1), 1-12.
- Murziqin, R. (2017). Context for Local Democracy and Problems Autonomy. *British Journal of Political Science*, 47(1), 19-30.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2017). A Consequence of Institutionalized Political Inequality. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 4(3), 231-242

- Patimah, S., & Tabrani ZA. (2018). Counting Methodology on Educational Return Investment. *Advanced Science Letters*, 24(10), 7087-7089. <https://doi.org/10.1166/asl.2018.12414>
- Prajudi Atmosudirdjo. (1982). *Administrasi dan Management Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rahman,dkk, (2011). *Actuating dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*. Lampung: Universitas Negeri Lampung
- Ramlan Surbakti. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo
- Sarboini, S., Rizal, S., Surya, J., & Yusuf, Z. (2018). The Effect of Leadership, Compensation and Competency on Employee Performance. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 6(2), 215-234. doi:10.26811/peuradeun.v6i2.199
- Soerjono Soekanto, (2001). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soewarno Handyaningrat, (1998). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung
- Sondang P. Siagian, (1974). *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung
- Sondang P. Siagian, (2006). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- ST. Vembriarto, (1998). *Pengantar Perencanaan Pendidikan: Educational Planning*, Yogyakarta: Andi Offset
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA, & Walidin, W. (2017). Hak-Hak Non Muslim dalam Pemerintahan: Konsep Dien wa Ni'mah dan Pluralisme Agama di Indonesia. *Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 3(1), 15-30.
- Tim Sembilan, (2004). *Tafsir Maudhu'i, Al-Muntaha*, jilid I. Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Walidin, W., Idris, S., & Tabrani ZA. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- Zakir Naik, (2016). *Mereka Bertanya Islam Menjawab*, terj. Nur Cholis, dkk. Solo: Penerbit Aqwam